

"AKUNTANSI SYARI'AH" DAN KOPERASI Mencari Bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah

Iwan Triyuwono

Abstrak

Diskursus akuntansi dalam konteks sosial dan organisasi sudah diperkenalkan sejak tahun 1980-an. Diskursus ini memahami akuntansi sebagai entitas yang selalu berubah (*an ever-changing entity*). Atau, akuntansi tidak lagi dipandang sebagai produk jadi dan statis (*a static and finished product*) dari suatu masyarakat, tetapi ia dipandang sebagai produk yang selalu mengalami perubahan setiap waktu tergantung pada lingkungan di mana ia hidup dan dipraktikkan (lihat, misal, Hopwood 1983, 1987, 1990; Morgan 1988; Miller dan Napier 1993).

Tulisan ini mencoba untuk memahami konsep organisasi melalui pendekatan Islam dengan menggunakan metafora Amanah. Pemahaman organisasi dengan pendekatan ini sangat penting mengingat bentuk akuntansi akan dipengaruhi oleh konsep dan bentuk organisasi di mana akuntansi tersebut dipraktikkan. Dengan kata lain, tulisan ini memandang bahwa organisasi "Amanah" memegang peran penting dalam membangun Akuntansi Syari'ah. Tulisan ini juga berusaha sedikit membandingkan antara konsep organisasi dan akuntansi koperasi dengan konsep organisasi Amanah dan Akuntansi Syari'ah.

1. Pengantar

Selama beberapa kurun waktu yang lalu, akuntansi secara tradisional telah dipahami dan diajarkan sebagai satu set prosedur rasional yang digunakan untuk menyediakan informasi, yaitu informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pengendalian (lihat Watts dan Zimmerman 1986; Horngren dan Foster 1991). Dalam pengertian semacam ini, akuntansi tampak seperti teknologi yang kelihatan konkrit,

* Dosen Fakultas Ekonomi Brawijaya, Malang

tangible dan bebas dari nilai masyarakat (*value-free*) dimana akuntansi tersebut dipraktikkan. Pandangan ini dalam studi kontemporer ternyata mendapatkan kritik yang keras dari pihak lain terutama kritik dari sisi asumsi filosofisnya (Sterling 1990; Dillard 1991; Manicas 1993).

Kemudian, sejak tahun 1980-an, mulai ada perhatian yang kuat dari para peneliti akuntansi dalam upaya memahami akuntansi dalam pengertian yang lebih luas, misalnya dalam konteks sosial dan organisasi. Adanya perhatian semacam ini berakibat pemahaman akuntansi menjadi berubah, yaitu akuntansi mulai dipahami sebagai entitas yang selalu berubah (*an ever-changing entity*). dengan kata lain, akuntansi tidak lagi dipandang sebagai produk jadi atau statis (*a static or finished product*) dari suatu masyarakat, tetapi dipandang sebagai produk yang selalu mengalami perubahan setiap waktu tergantung pada lingkungan dimana ia hidup dan dipraktikkan (lihat, misalnya, Hopwood 1983, 1987, 1990; Morgan 1988; Miller dan Napier 1993).

Perhatian ini sebenarnya telah dimunculkan beberapa tahun lalu ketika Tricker, misalnya mengatakan bahwa “[bentuk] akuntansi sebetulnya tergantung pada ideologi dan moral masyarakat. Ia [akuntansi] tidak bebas nilai. Ia adalah anak dari budaya [masyarakat]” (1978, 8). Dengan demikian, pandangan ini jelas memberikan implikasi terhadap studi akuntansi kontemporer. beberapa karya penelitian, tanpa memperhatikan pendekatan yang digunakan, telah menunjukkan bahwa akuntansi memang dibentuk oleh kultur masyarakat (Hofstede 1987; Gray 1988; Perera 1989; Riahi-Belkaoui dan picur 1991), oleh sistem politik (Solomons 1978, 1983; Tinker 1984; O’leary 1985; Daley and Mueller 1989), dan sistem sosial (Gambling 1974; Burchell *et al.* 1985). Pada tingkat mikro (organisasi), akuntansi juga telah berubah sesuai dengan arah dan pengaruh lingkungan organisasi, seperti restrukturisasi dan perbaikan organisasi; tugas-tugas organisasi; strategi, struktur dan pendekatan dalam pembagian kerja, teknologi dan praktik; dan konflik sosial dalam organisasi (Hopwood 1987).

Disamping mengalami perubahan-perubahan seperti tersebut di atas, akuntansi tidak begitu saja ada (eksis) tanpa pengaruh terhadap lingkungannya, tetapi juga secara aktif menebarkan kekuatan (pengaruh) potensialnya untuk mempengaruhi dan membentuk lingkungan serta realitas di mana ia hidup dan dipraktikkan. Morgan (1988), dalam hal ini, mengatakan bahwa akuntansi tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga membentuk realitas. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Hopwood (1990) menekankan juga peranan umum akuntansi dalam proses perubahan organisasi, bagaimana akuntansi menciptakan visibilitas dalam sebuah organisasi, bagaimana akuntansi berfungsi sebagai praktik kalkulasi, dan bagaimana akuntansi menciptakan domain untuk aksi ekonomi.

Akuntansi dalam dunia nyata telah membantu manajemen dan pihak lainnya dalam organisasi untuk melihat secara jelas fenomena konseptual dan abstrak yang belum pernah dipikirkan sebelumnya, seperti biaya (*cost*), dan laba (*profit*), yang dalam praktik akuntansi sekarang dikenal sebagai simbol yang telah diterima secara umum. Akibatnya, "ia [akuntansi] dapat mempengaruhi persepsi, merubah bahasa dan mendorong terjadinya dialog, yang oleh karena itu mempengaruhi cara-cara di mana prioritas, perhatian dan kekhawatiran, serta kemungkinan untuk melakukan suatu aksi diekspresikan" (Hopwood 1990, 9).

Fenomena ini dapat dilihat secara konkrit ketika konsep tersebut dimanifestasikan dalam bentuk kalkulatif. Dengan memperhatikan angka-angka akuntansi (*accounting numbers*), akuntan, atau ekonom, atau orang lain (yang punya perhatian terhadap angka-angka akuntansi) dapat "merubah dunia." Oleh karena itu, bukan sesuatu yang aneh bila Hopwood mengatakan bahwa "kekuatan kalkulatif secara potensial sangat besar" dan "ketika sesuatu telah masuk dalam kondisi kalkulatif, maka interpendensi organisasi dapat tercipta baik dengan fenomena kalkulatif melalui pemantapan hubungan alat-tujuan yang akurat maupun dengan tujuan dan pemikiran yang diartikulasikan untuk aksi organisasi" (1990, 9-10). Melalui kalkulasi ini, akuntansi berimplikasi pada pembentukan realitas konkrit

ekonomi dan fenomena keuangan, pada kecenderungan sejauh mana pertukaran ekonomi dapat dibuat, dan pada kondisi dalam menetapkan obyektivitas yang akurat dari transaksi ekonomi (Hopwood 1990).

Melihat begitu besarnya pengaruh akuntansi dalam membentuk realitas, Morgan (1988) secara kritis memberikan pandangan bahwa sebaiknya akuntansi tidak melihat dirinya sendiri sebagai agen yang pasif (*a passive agent*) yang cuma mempraktikkan bentuk teknik (*technical craft*) akuntansi, tetapi hendaknya menganggap dirinya sebagai agen yang merupakan bagian dari, atau secara aktif terlihat dalam proses pembentukan realitas sosial, yang mampu menginterpretasikan akuntansi sebagai realitas di mana maknanya (*the meanings of the reality*) pada gilirannya akan menjadi sumber bagi pembentukan (kembali) realitas sosial. Namun, pandangan apakah akuntan adalah agen yang aktif atau pasif sangat tergantung pada persepsi akuntan itu sendiri tentang hakekat dirinya (*human nature*) dan bagaimana dia melihat realitas.

Burrell and Morgan (1979, 2), dalam hal ini, mengungkapkan bahwa sebagian individu menganggap diri mereka sendiri dan pengalaman mereka sebagai produk dari, dan secara mekanis serta deterministik ditentukan oleh, lingkungan mereka. dengan demikian, mereka cenderung memahami realitas sosial (lingkungan) sebagai struktur yang tetap, konkrit dan keras, serta berdiri secara bebas dari pemikiran dan perasaan individu (manusia), dan memandang individu sebagai makhluk yang lahir dan hidup dalam realitas yang "sudah ada."

Sebaliknya, yang lain beranggapan bahwa diri mereka adalah individu yang memiliki *free-will*, yang mempunyai kapasitas untuk menciptakan secara aktif lingkungan (realitas) mereka. mereka menyadari bahwa dirinya adalah pencipta dan pengendali dari realitas yang telah diciptakannya. Mereka memahami realitas sosial ini sesungguhnya tidak lebih dari nama-nama, label-label dan konsep-konsep yang digunakan secara aktif untuk membangun realitas sosial (burrell dan Morgan 1979, 4; lihat juga Morgan dan Smircich 1980; Tomkins dan Groves 1983).

Asumsi ini, disamping yang lain, adalah asumsi yang jelas mengarahkan perkembangan praktik dan studi akuntansi (lihat, misalnya, Watts dan Zimmerman 1986, 1990; Tomkins dan Groves 1983; Preston 1986; Francis 1990; Sterling 1990; Dillard 1991; Chua dan degeling 1993; Schweiker 1993).

Bertolak dari beberapa pandangan dan pemikiran di atas, akhir-akhir ini banyak bermunculan peneliti akuntansi yang mempelajari akuntansi sebagai *organisationally-situated practice*, yaitu praktik yang sangat dipengaruhi lingkungan (organisasi) (Hopwood 1978, 1983; Chua 1988), termasuk studi praktik akuntansi yang berhubungan dengan organisasi agama, seperti gereja (lihat, misalnya, Cunningham and Reemsnyder 1983; Boyce 1984; Burcker and Smindle 1988; King 1988; Lauthlin 1988, 1990; Booth 1993).

Laughlin (1990), sebagai contoh, dengan menggunakan teori Gidden tentang *structuration theory*, mencoba mengetahui praktik akuntabilitas keuangan (hubungan prinsipal-agen) di gereja Inggris dalam konteks organisasi. Laughlin beranggapan bahwa teori tersebut (*structuration theory*) sebagai dedikasi untuk “memahami perilaku manusia dalam situasi tertentu dalam mempertahankan suatu keyakinan (*belief*) bahwa semua aksi dan interaksi memiliki pola (yang disebut struktur)” (1990, 94). Berdasarkan pada pemahaman ini, dia mencoba menangkap prakti akuntabilitas keuangan di gereja Inggris sebagai cara untuk memberikan isi pada struktur teori, dan dia juga memberikan perhatiannya pada “pemahaman tentang perbedaan antara bentuk-bentuk *ex ante* dan *ex post* dari akuntabilitas dan pertautan yang mereka miliki dengan pengendalian” (1990, 96). Dia berargumentasi bahwa, dalam hal hubungan akuntabilitas di Gereja, hubungan akuntabilitas antara *parish* dan *dioces*, *dioces* dan dewan pusat, dan anggota jemaat dan *parish* adalah dalam bentuk *ex ante*. Yang terakhir ini kurang terstruktur bila dibanding dengan dua yang pertama dan berpusat di sekitar apresiasi beberapa dewan tentang aktivitas masa mendatang tetapi ditata dalam konteks tantangan spiritual akan “kebutuhan pemberi untuk memberi” (1990, 111), sementara dua yang

pertama berpusat di sekitar proses pembuatan anggaran tahunan. Di sisi yang lain, hubungan antara Komisi gereja dan gereja dan Pemerintah lebih luas, seperti yang ditemukan Laughlin (1990), dilakukan dalam bentuk laporan formal, yaitu laporan tahunan *ex post*.

Keterangan di atas sekilas memberikan gambaran yang jelas bahwa akuntansi, pada dasarnya, sebuah entitas yang selalu berubah (berkembang); di mana arah perkembangannya banyak ditentukan oleh faktor lingkungan. Tulisan ini mencoba (1) memberikan atensi terhadap bentuk akuntansi yang dipengaruhi oleh organisasi dan nilai yang dimiliki oleh masyarakat Islam, (2) mencari bentuk akuntansi dalam bingkai syari'ah, (4) secara ringkas membandingkan konsep organisasi syari'ah dengan koperasi, dan (5) memberikan penilaian terhadap standar akuntansi untuk koperasi (PSAK 27).

Struktur tulisan ini disusun sebagai berikut: pada bagian kedua akan dijelaskan tentang sejarah akuntansi sebelum masa Luca Pacioli (1494). Maksud dari bagian ini adalah memberi penjelasan yang memperkuat tesis bahwa akuntansi adalah entitas yang selalu berubah. Penjelasan bagian ini mengambil pendekatan sejarah perkembangan akuntansi yang boleh dikata berkembang dan dipraktikkan sejak masa khalifah al-Ma'mun pada abad ke 9. Pada bagian ketiga mendiskusikan konsep organisasi dengan menggunakan pendekatan metafora sekaligus menjelaskan konsep organisasi syari'ah dan memetakan konsep koperasi dalam kerangka organisasi syari'ah. Pada bagian selanjutnya mendiskusikan konsep akuntansi syari'ah dan PSAK 27 (akuntansi koperasi).

1. Sejarah Akuntansi sebelum Masa Luca Pacioli (tahun 1494)

Akuntansi modern, sebagaimana umumnya dikenal dalam masyarakat bisnis, adalah sebuah media yang disusun oleh manajemen dalam rangka memberikan informasi (keuangan) - dari sebuah entitas bisnis - bagi pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan ekonomi dengan menggunakan

teknik tata-buku berpasangan (*double entry book-keeping*), yang muncul kira-kira lebih dari dua abad sebelum Luca Pacioli mengangkat dalam *Summa de Arithmatica, Geometria, Proportioni et Proportionalita* pada 1494, akuntansi mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan sistem ekonomi kapitalis (Storrar dan Scorgie 1988).

Tata-buku berpasangan - yang merupakan bangunan dasar akuntansi modern - pada awalnya mulai dikembangkan dari persamaan aljabar - kemudian dikenal dalam dunia akuntansi sebagai persamaan akuntansi (*accounting equation*). Dengan dasar persamaan ini transaksi-transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas bisnis, hanya berpengaruh pada perubahan-perubahan persamaan akuntansi tersebut tanpa mempengaruhi kesamaan (*equality*) dari unsur-unsur yang ada pada posisi kiri (debit) dan kanan (kredit) dari persamaan tersebut (Hatfield 1976; lihat juga Sprague 1907 dan Cronhelm 1978).

Keberadaan persamaan akuntansi tersebut, menurut Storrar dan Scorgie (1988), sebetulnya tidak terlepas dari keterlibatan Leonardo da Pisa yang pernah belajar dan melakukan perjalanan ke Mesir, Syria, Yunani, dan Sisilia. Storrar dan Scorgie (1988) mengklaim bahwa Leonardo da Pisa-lah yang secara efektif telah mem-perkenalkan angka Arab-Hindu dan aljabar ke Eropa Barat, yaitu dari hasil lawatannya di beberapa tempat tersebut di atas. Meskipun dia bukan satu-satunya orang yang pertama yang mengenal angka, tapi dialah orang pertama yang mendorong penggunaan angka untuk berbagai maksud dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akuntansi. Kemudian dari pengenalan angka Arab-Hindu dan aljabar ini, tata-buku berpasangan secara teknis berkembang.

Seperti telah dikemukakan di atas, tata-buku berpasangan sebetulnya telah lama dipraktikkan, namun tidak diketahui dengan jelas di mana sebenarnya tempat kelahiran pertama tata-buku berpasangan ini. Klaim bahwa ia lahir di Italia - karena dihubungkan dengan Luca Pacioli yang dianggap sebagai pecinta tata-buku berpasangan- adalah *tidak benar*. Karena teknik tata-buku berpasangan itu sebetulnya sudah dipraktikkan lebih dari 200 tahun di Venice sebelum bukunya diterbitkan. Luca

Pacioli hanyalah orang pertama yang mengangkat dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang tehnik tata-buku berpasangan tersebut (Luzzatto 1961). Ada dugaan, tempat kelahiran tata-buku berpasangan ini di Spanyol. Ini sesuai dengan pernyataan Littleton dan Yamey yang mengatakan bahwa,

Tehnik [tata-buku ber-pasangan] ini mestinya berasal dari Spanyol, dengan alasan bahwa kebudayaan dan teknologi Muslim abad pertengahan lebih unggul dan canggih dibanding dengan Eropa Barat, dan Spanyol [pada waktu itu] adalah saluran utama di mana kebudayaan dan teknologi Muslim ini dibawa ke Eropa (1978, 1).

Pendapat ini mungkin benar, mengingat Spanyol merupakan salah satu bagian kekuasaan Islam di Eropa. Pada waktu itu, sejak pemerintahan *Khulafa al Rasyidin, Dinasti Bani Umayyah* (661-750) dan Dinasti Bani Abbas (750-1258), kekuasaan Islam meluas ke Bizantium, Mesir, Palestina, Suriah, Mesopotamia (Irak), seluruh Afrika Utara, Spanyol di Eropa, dan daerah-daerah di Asia Timur sampai ke perbatasan Cina.

Daerah-daerah seperti Mesir, Suriah, Irak, dan Persia di Timur Tengah merupakan daerah pusat perdangan di mana barang dagangan dibawa ke barat. Kota-kota seperti Kairo, Aleksanderia, Damsyik, Baghdad dan Siraz merupakan kota-kota terpenting dalam lalu lintas perdagangan internasional saat itu. Melalui perdagangan inilah, demikian Storrar dan Scorgie (1988) juga berpendapat kebudayaan dan tehnologi Muslim tersebar di Eropa Barat. Amalfi, Venice, Pisa dan Genoa merupakan pelabuhan-pelabuhan utama dan terpenting yang menghubungkan perdagangan dari pelabuhan-pelabuhan orang Islam di Afrika Utara dan Laut Tengah bagian Timur, ke kota-kota Kristen seperti Barcelona, Konstantinopel dan Acre. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Lieber (1968,203); ia mengatakan bahwa,

Pedagang-pedagang Italia dan negara-negara Eropa lainnya memperoleh pendidikan pertamanya dalam penggunaan metode-

metode bisnis yang canggih dari rekan bisnis mereka dari daerah sekitar laut Tengah; yang kebanyakan mereka adalah Muslim, walaupun terdapat juga beberapa gelintir orang Yahudi dan Nasrani.

Dari bahasa mereka, terutama dari bahasa Aramaik, Arab dan Persi, kemudian muncul istilah-istilah seperti "*douane, arsenal, magazine, traffic, tariff, risk, fondac, sensal, galega, aval dan maona*" (lieber 1968, 230). Perdagangan internasional menjadi begitu meluas, sehingga beberapa gudang dan bahkan daerah-daerah perkotaan di pelabuhan-pelabuhan Muslim disisihkan untuk pedagang-pedagang dari Barat yang sedang berkunjung (baik sementara maupun secara permanen selama musim dagang) ke kota-kota Muslim dengan jaminan perlindungan keamanan dari penguasa-penguasa Muslim (Lopez and Raymond 1955).

Disamping melalui kontak perdagangan, kebudayaan dan teknologi Muslim juga meluas ke Eropa melalui akademis. Menurut William Montgomery Watt (1972), superioritas Muslim pada waktu itu terletak pada ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang matematika (aljabar), kedokteran, astronomi, produksi barang-barang mewah, dan pengembangan teknik-teknik dagang yang tinggi. Salah satu pusat terpenting kegiatan akademis Muslim pada saat itu adalah kota Bagdad, yaitu pada jaman Khalifah Al-Ma'mun (813-833). Di kota itu, sebuah akademi telah didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun, yang kemudian selama bertahun-tahun banyak menarik minat orang Islam sendiri dan orang asing untuk belajar dan menterjemahkan bahasa Yunani, Sansekerta dan teks-teks lainnya ke bahasa Arab.

Menurut Lewis (1950), di antara orang asing itu, ada seorang India yang melalui dia untuk pertama kalinya angka Arab-Hindu mulai diperkenalkan. Ini terjadi kira-kira pada tahun 800. Kemudian Storrar dan Scorgie (1988) berpendapat bahwa matematika Muslim abad pertengahan diturunkan sebagian dari Yunani dan sebagian dari India, tetapi sintesa dan pengembangan berikutnya adalah asli kontribusi dari orang Islam itu sendiri, seperti angka nol yang kemudian ditemukan

dan difungsikan oleh orang Islam. Hal ini bisa dilihat pada karya orang yang paling tangguh yang hidup pada abad ke-9 dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan matematika di Eropa, yaitu Al Khawarizma. Dialah orang yang meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pengembangan matematika modern seperti yang dikenal sekarang ini, dan secara tidak langsung telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan akuntansi modern. Dia pulalah yang memberikan konsep-konsep aljabar yang dapat digunakan untuk menemukan pemecahan terhadap masalah-masalah praktis seperti pembagian harta warisan, perkara hukum (*lawsuits*) dan transaksi-transaksi dagang yang secara umum ditemukan oleh masyarakat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu inilah yang kemudian dipelajari oleh Leonardo da Pisa dan disebarkan di Eropa.

Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus juga menunjukkan bahwa masyarakat di dunia Islam tidak lagi buta huruf. Hal ini terbukti jelas dalam sistem dagang dan tata-buku yang dipraktikkan mereka. Keadaan ini juga didukung oleh tersedianya kertas yang murah (karena dihasilkan oleh teknologi yang cukup tinggi). Dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, pada abad ke-10, demikian dikatakan oleh Leiber (1968), tata-buku di Irak telah tersebar luas dan diterima secara umum (*generally accepted*) serta dipraktikkan di berbagai daerah. bahkan kebutuhan akan penggunaan tata-buku ini merupakan persyaratan hukum bila terjadi perselisihan (*dispute*) antara dua pihak atau lebih. Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang berselisih, maka mereka secara hukum harus menunjukkan catatan atas perkiraan semua penjualan, pembelian, laba, rugi, dan hutang-hutang yang belum dilunasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di muka pengadilan.

Dengan bukti-bukti tersebut di atas terlihat bahwa sebelum masa Luca Pacioli (1494) ummat Islam memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan akuntansi. Namun, pada abad-abad berikutnya dan sampai saat ini, akuntansi berkembang pesat di Eropa (dan negara-negara Barat lainnya) dan dikembangkan oleh orang-orang Barat itu sendiri. Perkembangan tersebut boleh

dikatakan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompleksitas kehidupan sosial, ekonomi dan politik mereka. Dan, perkembangan akuntansi di tangan barat (tepatnya mulai abad ke 17) menjadi benar-benar sekuler (lihat Aho 1985).

2. Organisasi Syari'ah dan Koperasi

Dalam perkembangan berikutnya akuntansi banyak dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu di antaranya adalah bentuk organisasi. Dalam sub bab ini kita akan mendiskusikan organisasi dalam perspektif syari'ah.

Organisasi, dalam konteks pembahasan ini, adalah perusahaan yang dalam pengertian tradisional mempunyai tujuan memaksimalkan laba untuk kepentingan pemilik perusahaan (*stockholders*) tanpa harus ada kewajiban sosial (*social responsibility*). Pengertian tradisional ini begitu dominan, sehingga sampai saat ini masih banyak perusahaan yang menggunakan konsep tersebut. Bahkan pandangan ini diperkuat oleh Milton Friedman (1970) - seorang ekonom pemenang hadiah Nobel - yang dalam tulisannya berjudul *The Social Responsibility of Business is to Increase Its profits* mengatakan:

Businessman who talk this way [proposing social responsibility of business] are unwitting puppets of the intellectual forces that have been undermining the basis of a free society these past decades....there is one and only one social responsibility of business - to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without despection or fraud.

Friedman jelas menolak adanya tanggungjawab sosial bagi perusahaan, atau dengan kata lain, ia mereduksi tanggungjawab sosial dalam bentuk pencapaian laba (yang maksimal). Dalam dunia nyata, konsep ini bukannya tanpa masalah. Karena motivasi untuk memperoleh laba maksimal, secara

psikologis, akan menstimulasi timbulnya perilaku egoistik secara berlebihan.

Metafora Mesin

Tujuan mencapai laba maksimal menjadi semakin mapan ketika organisasi dikonstruksi sedemikian rupa dengan menggunakan metafora (kiasan) tertentu. Adalah Morgan (1986) yang mengatakan bahwa kebanyakan organisasi modern dibangun, dikembangkan, dan dioperasikan berdasarkan metafora mesin. Sebagaimana layaknya mesin, organisasi dapat dipersepsikan sebagai entitas yang di dalamnya terdapat jaringan-jaringan kerja dari beberapa departemen produksi, pemasaran, keuangan, personalia, dan litbang (penelitian dan pengembangan) didesain secara spesifik dengan menggunakan jaringan kerja (*job responsibilities*) dipersambungkan sedemikian rupa sehingga mereka dapat saling melengkapi dan dihubungkan melalui rantai komando yang diekspresikan dalam dikturn klasik "one man one boss" (Morgan 1986, 27). semuanya ini dilakukan untuk merealisasikan tujuan utama organisasi.

Alur gerak struktur organisasi berjalan melalui pola otoritas yang telah ditentukan. Ini artinya bahwa komando dari otoritas di atas akan sampai ke bawah tanpa bias, dan bawahan atau karyawan yang ada dalam organisasi tersebut akan selalu patuh terhadap semua perintah yang diterima. Dengan kata lain, perintah atasan benar-benar efektif sehingga dilakukan oleh bawahannya. Penggunaan metafora mesin ini begitu efektif sehingga mampu menciptakan transformasi, terutama dalam hal aktivitas-aktivitas produktif organisasi, dan juga telah meninggalkan kesan yang cukup mendalam bagi imajinasi, pemikiran, dan perasaan (*feelings*) para ilmuwan.

Para ilmuwan (akhirnya) menghasilkan interpretasi mekanik terhadap dunia alam, pemikiran dan perilaku manusia, demikian juga terhadap diri manusia itu sendiri, masyarakat (*society*), dan tatanan sosial (Morgan 1986, 23&27). Akibat dari interpretasi semacam ini akhirnya realitas kehidupan manusia menjadi

mekanistik dan tidak berbeda dengan mekanisme kerja mesin. Tentang hal ini Morgan memberi penjelasan:

Consider, for example, the mechanical precision with which many of our institutions are expected to operate. Organizational life is often routinized with the precision demanded of clockwork. People are frequently expected to arrive at work at a given time, perform a predetermined set of activities, rest at appointed hours, then resume their tasks until work is over. In many organizations one shift of workers replaces another in methodical fashion so that work can continue uninterrupted twenty-four hours a day, every day of the year. Often the work is very mechanical and repetitive. Anyone who has observed work in the mass-production factory, or in any of the large "office factories" processing paper forms such as insurance claims, tax returns, or bank checks, will have noticed the machinelike way in which such organizations operate. They are designed like machines, and their employees are in essence expected to behave as if they were parts of machines (1986, 20).

Pada posisi yang sama, Sugiharto (1996, 29) juga mengatakan bahwa dunia modern yang objektivistik dan positivistik cenderung membuat manusia sebagai objek dan kemudian "masyarakat pun direkayasa bagai mesin." Di sinilah akhirnya terjadi reduksi nilai manusia. Manusia dididik dan dilatih dengan ketrampilan tertentu sesuai dengan *job* di mana ia akan ditempatkan. Ia direduksi menjadi *sparepart* dari sebuah mesin organisasi dengan tujuan meraih laba semaksimal mungkin. Dengan metafora mesin ini, organisasi terfokus pada tujuan, struktur, dan efisiensi (Morgan 1986, 40).

Metafora Organisme

Maksimasi laba dan perilaku yang mekanistik menjadi suatu hal yang dominan dalam kehidupan modern, atau bahkan akhirnya menjadi logosentrisme, yaitu sistem pola berfikir yang mengklaim adanya legitimasi dengan referensi kebenaran universal dan eksternal (Rosenau 1992, xii). Artinya, maksimasi laba dan perilaku mekanistik adalah suatu bentuk "kebenaran"

yang dapat dijadikan referensi yang sah untuk berperilaku dalam dunia bisnis. Logosentrisme yang berpusat pada dua hal tersebut di atas dalam kenyataannya banyak menciptakan masalah baik bagi kehidupan sosial, ekonomi, maupun lingkungan alam.

Pemikiran-pemikiran ke arah perbaikan telah dilakukan oleh mereka yang sensitif dan kritis terhadap masalah ini. Evan dan Freeman (1993), sebagai contoh, mengajukan sebuah tesis yang lebih baik bila dibanding dengan konsep yang pertama di atas. mereka mengatakan bahwa:

... we can revitalize the concept of managerial capitalism by replacing the notion that managers have a duty to stockholders with the concept that managers bear a fiduciary relationship to stakeholders (1993, 255).

Dari pernyataan ini mereka kemudian mengusulkan apa yang dinamakan dengan *stakeholder theory*. Berbeda dengan Friedman, yang mengklaim bahwa tanggungjawab sosial perusahaan hanyalah memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham (*stockholders*), Evan dan Freeman mengajukan konsep yang lebih baik dan luas dengan menyatakan bahwa kesejahteraan yang dapat diciptakan oleh perusahaan sebetulnya tidak terbatas kepada kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan *stakeholders*. *Stakeholders*, bagi Evan dan Freeman (1993, 255), adalah semua pihak yang punya keterkaitan dengan, atau klaim terhadap, perusahaan. Mereka adalah pemasok, pelanggan, karyawan, pemegang saham, masyarakat lokal, manajemen, dan lain-lainya. Konsep *stakeholder* sebetulnya merupakan bentuk perluasan dari pengertian pemegang saham di mana mereka mempunyai klaim khusus terhadap perusahaan. Seperti halnya pemegang saham yang mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, *stakeholders* juga mempunyai hak terhadap perusahaan.

Timbulnya *stakeholders theory* yang dikemukakan oleh Evan dan Freeman (1993, 256) ini lebih didasari oleh suatu keadaan

(hukum) yang mengunggulkan kepentingan pemegang saham dan, sebaliknya, mensubordinasikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan masyarakat sekelingnya. Dua aspek penting yang dikemukakan oleh Evan dan Freeman (1993, 258-9) dalam teorinya adalah hak (*right*) dan akibat (*effect*). Aspek pertama, hak, pada dasarnya menghendaki bahwa perusahaan dan para manajernya tidak boleh melanggar hak dan menentukan masa depan pihak lain (*stakeholders*); sedangkan yang kedua, *akibat*, menghendaki agar perusahaan dan manajemen harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Teori ini dengan jelas menampilkan corak baru dalam mempersepsikan perusahaan dalam bentuk yang lebih sosial dan humanis, serta memberikan kesadaran etis tentang tanggung jawab sosial.

Bila kita hubungkan dengan metafora-metafora yang dikemukakan oleh Morgan (1986), maka kita dapat menggolongkan bahwa *stakeholder theory* dilahirkan dari metafora organisme/mahluk hidup (*organism*). Metafora ini menganggap bahwa sebuah organisasi sebetulnya tidak lebih dari organisme, yaitu makhluk hidup yang untuk menjaga kelangsungan hidupnya harus selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu hubungan antara tujuan, struktur, dan efisiensi tidak lagi menjadi bagian yang sangat utama, tetapi hanya sebagai pelengkap. Hubungan itu bergeser kepada hubungan organisasi-lingkungan dan efektivitas organisasi (Morgan 1986, 40). Dan, interaksi yang dilakukan dapat bersifat internal maupun eksternal. Interaksi internal dilakukan oleh organisasi - sebagai organisme yang memiliki "organ-organ biologis", seperti manajemen, karyawan, sistem informasi, departemen-departemen, dan lain-lainnya - supaya ia secara individual bisa eksis sebelum berinteraksi terhadap lingkungannya. Keberadaan interaksi internal menunjukkan bahwa organisasi masih dalam keadaan hidup, dan pada gilirannya mampu melakukan interaksi dengan lingkungan di luar dirinya, yaitu: pemasok, pelanggan, masyarakat di sekitarnya, dan pemegang saham.

Evan dan Freeman (1993) dalam mengajukan tesisnya tentang *stakeholder theory* mengasumsikan organisasi sebagai

organisme, dalam hal ini adalah “orang” (*person*) yang mempunyai hak dan kewajiban. Teori organisasi yang dihasilkan jelas berbeda dengan teori yang dikembangkan dengan menggunakan metafora “mesin” sebagai benda mati. Bukan suatu hal yang aneh, bila *stakeholder theory* bersifat lebih humanis dibanding dengan teori organisasi lainnya yang berdasarkan metafora mesin.

4. Metaforan Organisasi dalam Perspektif Islam

Metafora lain digunakan untuk mendesain dan mengoperasikan organisasi adalah metafora *amanah*. Metafora ini mempunyai nuansa humanis dan transendental. Metafora amanah sebetulnya diangkat dari penelitian empiris yang dilakukan terhadap organisasi bisnis dan sosial yang secara eksplisit berdasarkan pada Syari’ah (lihat Triyuwono 1995). “Amanah” adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Ini artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki kewajiban penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Ia memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah.

Dalam metafora amanah ini ada tiga bagian penting yang harus diperhatikan yaitu: pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri. pemberi amanah, dalam hal ini, adalah Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta. Dengan kekuasaannya yang Maha besar, Tuhan menciptakan manusia sebagai wakilnya di bumi (*Khalifatullah fil Ardh*), seperti difirmankan dalam al-Qur’an:

Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para Malaikat:
“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” (QS. 2:30)

Dialah yang menjadikan kami khalifah-khalifah di muka bumi
(QS. 35:39)

Kata khalifah ini memberikan suatu pengertian bahwa seseorang yang telah diangkat sebagai khalifah akan mengemban suatu amanah yang harus dilakukan sesuai dengan keinginan Pengutusnyanya. Tentang hal ini Rahardjo (1995, 47) mengartikan khalifah sebagai:

sebuah fungsi yang diemban oleh manusia berdasarkan amanah yang diterimanya dari Allah. Amanah itu pada intinya adalah tugas mengelola bumi secara bertanggung jawab, dengan menggunakan akal yang telah dianugerahkan Allah kepadanya.

Pernyataan ini menguatkan pengertian bahwa manusia dengan predikat khalifah Allah di bumi mengemban amanah atau tugas tertentu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ini berarti bahwa penerima amanah, dalam melakukan segala sesuatu, harus berdasarkan pada kesadaran diri (self-consciousness) bahwa ia sebenarnya adalah khalifah Tuhan di bumi yang mempunyai konsekwensi bahwa semua aktivitasnya harus sesuai dengan keinginan Tuhan (*the will of God*). Atau, dengan ungkapan yang lain, penerima amanah harus menjadikan predikat "khalifah Tuhan di Bumi" (*khalifatullah fil Ardh*) sebagai cara pandang (perspektif) dalam setiap gerak langkah kehidupannya baik secara individu maupun secara komunal.

Dengan mengakui bahwa perspektif ini sebagai perspektif yang tunggal dan universal, maka penerima amanah akan secara sadar mengetahui tentang amanah yang harus ditunaikannya, yaitu, "mengelola bumi secara bertanggung jawab" (Rahardjo 1955, 47), atau dengan menggunakan bahasa al-Qur'an, "menyebarkan rahmat bagi seluruh alam," seperti yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an 21:107:

..sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah (QS. 38:26).

Tuhan menghendaki bahwa organisasi yang dikelola manusia harus dilakukan dengan cara-cara yang *adil*. Untuk mengetahui dengan tepat apa yang dimaksud *adil*, penerima amanat (manusia) dapat menggunakan potensi internal yang dimilikinya secara baik dan seimbang. Potensi internal yang fitrah tersebut adalah akal dan hati nurani.

Dengan kedua potensi utama ini diharapkan manusia mampu membaca kehendak Tuhan, baik yang dinyatakan secara verbal maupun non-verbal. Salah satu kehendak yang secara eksplisit dinyatakan Tuhan adalah bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh setiap manusia - yaitu tindakan untuk menunaikan amanah - harus dilakukan dalam kerangka penyembahan atau pengabdian kepada pemberi amanah. Dalam hal ini Tuhan berfirman:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku (QS. 51:56).

Firman ini merupakan suatu peringatan bagi manusia yang pada dasarnya mengikat dan mengingatkan bahwa semua yang ia lakukan semata-mata sebagai bentuk penyembahan (ibadah) kepada Tuhan.

Dari uraian singkat tersebut di atas - tentang amanah dan ibadah, kita dapat melihat satu nilai yang sangat esensial, yaitu nilai ketundukan "diri" terhadap kehendak atau kuasa Ilahi. Nilai ketundukan semacam ini bukan sesuatu yang aneh, karena nilai tersebut merupakan esensi atau inti sari ajaran Islam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn Tamiyyah:

Sebenarnya, hakikat agama, yaitu agama Tuhan Seru sekalian alam, ialah apa (inti ajaran) yang disepakati (ajaran yang sama) antara para nabi dan rasul, sekalipun bagi setiap Nabi dan Rasul itu ada *syir'ah* dan *minhaj* (tersendiri)...*Syir'ah* adalah sebanding dengan *syari'ah* (air mengalir) pada sungai, dan *minhaj* adalah jalan yang dilalui oleh air itu. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai itulah hakikat agama, yaitu penyembahan (*ibadah*) hanya kepada Allah semata, tanpa sekutu. Itulah hakikat Islam, yaitu hendaknya seorang hamba berpasrah diri (*yastuslimu*) hanya kepada Allah seru sekalian alam, dan tidak berpasrah diri kepada

yang lain. Barang siapa yang pasrah kepada yang lain maka ia adalah orang yang musyrik. Dan Allah tidak mengampuni jika Dia dipersekutukan. Barangsiapa tidak pasrah kepada Allah, bahkan ia menjadi sombong dari beribadah kepada-Nya, maka ia termasuk yang difirmankan Allah, Sesungguhnya mereka yang sombong dari kepada-Ku, mereka akan masuk jahanam dalam keadaan terhina” (Q., s. al-Mu'min/40:60). Agama Islam adalah agama orang terdahulu dari kalangan para Nabi dan Rasul, dan firman Allah, “Barangsiapa menganut selain Islam sebagai *din* maka ia tidak akan diterima”, adalah bersifat umum untuk segala jaman dan tempat. Maka Nuh, Ibrahim, Ya'qub, al-asbath (para Nabi dari suku-suku Bani Israil), Musa, Isa, kaum *Hawariyyun* (para sahabat nabi Isa) semua mereka itu, agama mereka adalah *al-islam*, yaitu ibadah kepada Allah semata tanpa sekutu bagi-nya. Tentang Nuh, Allah berfirman, “Wahai kaumku! Jika terasa berat atas kamu kedudukanku dan peringatanku tentang ayat-ayat Allah ini maka aku hanya bertawakal kepada Allah. Karena itu kumpulkanlah kekuatanmu...” (Q.,s Yunus/10:71). Firman Allah lagi, “Tidak ada yang benci lagi kepada agama Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Dan kami telah memilihnya di dunia, dan di akhirat pastilah ia termasuk orang-orang saleh. Ketika Tuhan-nya bersabda kepadanya, “pasarahlah engkau (*aslim*)! Ia menjawab, “Aku pasrah (*aslammu*) kepada Tuhan Seru sekalian alam.” Dengan ajaran itu Ibrahim dan Ya'qub berpesan kepada anak-anaknya, “Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memiliki agama untukmu sekalian. Maka janganlah kamu mati kecuali sebagai orang-orang yang pasrah (melakukan Islam, *muslimun*” (Q.,s al-Baqarah/2:130)...Ibn Tamiyyah, tanpa tahun, 97-99)¹.

Jadi para Nabi itu semuanya, beserta para pengikut mereka, tanpa kecuali disebutkan oleh Allah Ta'ala bahwa mereka itu adalah orang-orang yang pasrah (muslimun). Ini merupakan penjelasan bahwa firman Allah, “Dan barangsiapa menganut selain *al-islam* sebagai agama maka tidak akan diterima daripadanya dan ia di akhirat termasuk orang-orang merugi” (Q., s. 'Alu 'Imran/3:58); dan firman Allah, “Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah *al-islam* (Q.,s 'Alu 'Imran/3: 19), (semuanya itu) tidaklah khusus untuk (golongan) manusia yang nabi Muhammad saw.

¹ Keterangan ini adalah argumentasi Ibn Tamiyyah (tanpa tahun) (dikutip dari madjid 1995, 79-81) dalam *Al-Furqan bayna Awliya' al-Rahman wa Awliya' al-Syathhan*. Riyadl: Idarat al-Buhuts al-'Ilmiyah wa al-Da'wah wa al-Irsyad.

diutus kepada mereka, melainkan hal itu merupakan hukum umum tentang golongan yang terdahulu yang kemudian. Karena itulah Allah berfirman, "Dan siapalah yang lebih baik dalam hal agama daripada orang yang memasrahkan (*aslama*) dirinya kepada Allah dan ia itu berbuat baik, serta mengikuti agam Ibrahim secara *hanif* (mengikuti naluri kesucian)... (Ibn Tamiyyah, tanpa tahun, 288-9²)

Pendapat Ibn Tamiyyah ini kemudian dipertegas oleh Madjid dengan mengatakan bahwa:

...menurut Ibn Tamiyyah hakikat sebenarnya dari agama ialah *islam*, yaitu sikap tunduk dan pasrah kepada Allah dengan tulus, dan tidak ada agama yang bakal diterima oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kecuali *islam* dalam pengertian ini. Tunduk dan patuh dengan tulus kepada Allah dalam semangat penuh pasrah dan tawakal serta percaya itulah inti makna hidup kita (1995, 79).

...*Islam* itulah inti hidup keagamaan, yaitu sikap tunduk (*din*, dari kata kerja *dana-yadinu*) kepada Allah swt. yang menghasilkan *salam* (damai) dengan Allah, diri sendiri, sesama manusia dan alam sekelilingnya. Maka *Islam* menghasilkan *salamah* (*salamat*, selamat) sejahtera dan sentosa (1995, 77).

Jadi nilai terpenting dari kesadaran yang dimiliki oleh manusia adalah sifat ketundukan dan kepasrahannya kepada Tuhan semesta alam ini menjadikan sebuah konsekwensi bahwa organisasi dalam seluruh masa hidupnya harus dioperasikan atas dasar nilai-nilai etika, yang dalam kaitannya dengan bisnis dinamakan etika bisnis. Kebutuhan untuk menerapkan etika bisnis ini sebetulnya bukan hanya dari pandangan tradisi Islam, tetapi juga pandangan manusia yang mempunyai kepedulian terhadap masalah ini. Sebagai contoh, kepedulian ini dinyatakan oleh Chryssides dan kaler (1993). Menurut mereka, etika bisnis adalah:

...ethics as it applies ti business...[It is] about whether we ought or ought not to perform certain kinds of actions; about whether those actions are good or bad, right or wrong, virtuous or

² Sebagaimana yang dikutip oleh Madjid (1995, 81) dari Ibn Tamiyyah (tanpa tahun). al-Jawab al Shahih li man Baddala Din al-Masih. Jeddah: Mathabi' al-Majd al-Tijariyyah. Jil. 1

vicious, worthy of praise or blame, reward or punishment, and so on (1993, 12).

Perhatian Chryssides dan Kaler ini bukannya tanpa latar belakang, karena mereka, dan mungkin juga kita, melihat ada suatu kesan bahwa seolah-olah bisnis sama sekali tidak ada hubungannya dengan etika. Paling tidak kesan ini diperoleh de George, sehingga ia mengatakan:

The position that ethics has nothing to do with business has a long history. But it is a position that takes to narrow a view of both ethics and business. Ethics is concerned with the goods worth seeking in life and with the rules that ought to govern human behavior and social interaction. Business is not just a matter of economic exchange, of money, commodities, and profits; it involves human interactions, is basic to human society, and is intertwined with the political, social, legal, and cultural life of society (1993, 37).

Pernyataan De George di atas sebetulnya merupakan refleksi dari keadaan bisnis sekarang yang mengidentifikasi bahwa masyarakat (bisnis) mempunyai persepsi yang salah tentang etika. Etika, menurut persepsi mereka, sama sekali tidak memiliki sesuatu yang dapat dilakukan dengan bisnis. Etika adalah sesuatu hal dan bisnis adalah suatu hal yang lain, keduanya adalah sesuatu yang sangat berbeda. Kesan semacam ini juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti terlihat dalam pernyataan di bawah ini:

...wah gimana ya? *Wong* sekarang ini mencari rejeki yang haram saja sulit, apalagi mencari yang halal. Yah...kita ikut arus saja, *nggak* perlu ideal *pake* [memakai] etika segala. Kita ikut yang praktis...kalau *nggak gitu* [begitu], yah kita *nggak* kebagian.

Kesan yang sama juga dikemukakan oleh Keraf:

Namun yang masih sangat memprihatinkan adalah bahwa bisnis hampir tidak pernah atau belum dianggap sebagai suatu profesi yang luhur. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang menganggap bahwa bisnis adalah suatu pekerjaan yang kotor dan dicemoohkan. Itulah sebabnya bisnis selalu mendapat konotasi

yang jelas.. Kesan dan sikap masyarakat seperti itu sebenarnya disebabkan oleh ulah orang-orang itu sendiri, atau lebih tepat ulah beberapa "orang bisnis" yang memperlihatkan citra yang begitu negatif (1991, 51-2)

Kepedulian akan etika bisnis ini menjadi sesuatu yang krusial, karena tanpa ada kepedulian semacam ini mustahil bisnis dapat dianggap, seperti dikatakan Keraf, sebagai profesi yang luhur; dan mustahil pula akan tercipta peradaban bisnis yang sarat akan nilai etika, atau, tercipta peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental (Kuntowidjojo 1991), dan teleogikal.

Dalam tradisi Islam, atau organisasi yang menggunakan metafora "amanah" etika (bisnis) "diformulasikan" dalam bentuk Syari'ah, di mana dalam pengertian yang luas, ia (Syari'ah) merupakan pedoman yang digunakan oleh umat Islam untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan.

Bagi umat Islam, kegiatan bisnis tidak akan pernah terlepas dari "ikatan" etika Syari'ah. Oleh karena itu, bukan suatu hal yang berlebihan bila, misalnya, bank Islam beroperasi berdasarkan pada nilai etika Syari'ah. Bahkan secara formal bank Islam membentuk suatu badan khusus dalam organisasinya. Badan ini bertugas memberikan pandangan dasar-dasar etika (atau pengawasan) Syari'ah bagi manajemen dalam menjalankan operasi bank. Badan tersebut dinamakan Dewan Pengawas Syari'ah yang berdiri secara independen di dalam organisasi bank.

Dari keterangan di atas, secara eksplisit terlihat bahwa eksistensi etika Syari'ah dalam organisasi bisnis sebetulnya merupakan konsekwensi logis penggunaan metafora "amanah" dalam melihat sebuah organisasi. Konsekwensi semacam ini akan sulit ditemukan dalam metafora yang lain.

Realita Organisasi yang Dimetaforakan dengan Zakat

Dalam bentuk yang lebih operasional, metafora "amanah" bisa diturunkan menjadi metafora "zakat" atau realitas organisasi

yang dimetaforakan dengan zakat (*a zakat metaphorised organisational reality*). Ini artinya adalah bahwa organisasi bisnis orientasinya tidak lagi *profit-oriented*, atau *"stakeholders-oriented,"* tetapi *zakat-oriented* (Triyuwono 1995). Dengan orientasi zakat ini, perusahaan berusaha untuk mencapai "angka"³ pembayaran zakat yang tinggi. dengan demikian, laba bersih (*net profit*) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan.

Penggunaan metafora zakat untuk menciptakan realitas organisasi mempunyai beberapa makna. *Pertama*, ada transformasi dari pencapaian laba bersih (yang maksimal) ke pencapaian zakat. Ini berarti bahwa pencapaian laba bukan merupakan tujuan akhir (*the ultimate goal*) perusahaan, tetapi hanya sekedar tujuan antara. *Kedua*, karena yang menjadi tujuan adalah zakat, maka segala bentuk operasi perusahaan harus tunduk pada aturan main (*rules of game*) yang ditetapkan dalam Syari'ah. *Ketiga*, zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistik (*egoistic, selfish*) dan altruistik/sosial (*altruistic*) - mementingkan lebih dulu kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Karakter egoistik menyimbolkan bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk mencari laba (namun tetap dalam bingkai Syari'ah), dan kemudian sebagian dari laba (dan kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat. Sedangkan altruistik mempunyai arti bahwa perusahaan juga mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap kesejahteraan manusia dan alam lingkungan yang semuanya ini tercermin dalam zakat itu sendiri. *keempat*, zakat mengandung nilai emansipatoris. Ia adalah lambang pembebas alam dari penindasan dan eksploitasi manusia. *Kelima*, zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang profan (duniawi dan suci (ukhrawi)). Ia (zakat), sebagai jembatan, memberikan kesadaran ontologis bagi diri manusia bahwa segala bentuk kegiatan profan selalu berkait

³ Pengertian angka dan zakat di sini tidak perlu diartikan secara sempit, karena *zakat-oriented* itu sendiri adalah metafora yang mempunyai makna dan konsekuensi yang luas dan komprehensif.

erat dengan kedudukan manusia di hadapan Tuhan kelak di Akhirat.

Secara ideal, organisasi bisnis hendaknya dapat menciptakan realitas organisasinya berdasarkan pada metafora zakat. Implikasi dari hal ini adalah bahwa semua perangkat organisasi akan disusun sedemikian rupa sehingga benar-benar merefleksikan zakat sebagai metafora. Ini adalah sebuah bentuk transformasi. Transformasi ini tidak saja akan mempengaruhi perilaku manajemen, *stockholders*, karyawan, dan masyarakat sekelilingnya, tetapi juga perangkat informasi, dalam hal ini adalah bentuk akuntansi yang digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Namun demikian, ini bukan berarti bahwa bentuk organisasi adalah faktor satu-satunya yang dapat mempengaruhi bentuk akuntansi. Faktor-faktor lain seperti sistem ekonomi, sosial, politik, peraturan perundangan-undangan, kultur, persepsi, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap bentuk akuntansi. Ini juga adalah sebuah bukti bahwa akuntansi adalah sebuah informasi yang tidak bebas nilai.

Organisasi Koperasi

Koperasi adalah salah satu bentuk organisasi. berbeda dengan organisasi bisnis (perusahaan), koperasi adalah suatu bentuk organisasi ekonomi yang lebih berwatak sosial. Ia mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggotanya secara khusus, dan masyarakat pada umumnya (lihat UU. No. 25/1992, pasal 3 dan 4).

Bila peningkatan kesejahteraan para anggota dan masyarakat dilakukan secara proposional, maka konsep organisasi koperasi sangat dekat dengan *stakeholder theory* yang dikemukakan oleh Evan dan Freeman (1993). Hal ini demikian, karena ia tidak saja berusaha meningkatkan kesejahteraan "pemilik" (para anggota), tetapi juga masyarakat.⁴ Namun sebaliknya, bila kesejahteraan

⁴ Asal saja pengertian "masyarakat" di sini adalah pelanggaran, kreditor, pemasok, pemerintah, masyarakat di lingkungan koperasi, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan koperasi.

tersebut didistribusi-kan secara tidak proposional, dalam arti terlalu mementingkan anggota dan menyepelekan masyarakat, maka koperasi tidak berbeda dengan organisasi bisnis yang bertujuan memaksimalkan laba untuk kepentingan pemiliknya.

Jika dipahami sebagai organisasi yang dibangun dengan menggunakan *stakeholder theory*, maka hal ini yang demikian adalah suatu hal yang tepat. Namun bila kita bandingkan dengan konsep organisasi syariah, maka kita akan melihat bahwa konsep organisasi koperasi belum memasukkan unsur lain yang seharusnya juga menjadi kepedulian koperasi. Unsur tersebut adalah "alam" organisasi syariah, seperti yang telah kita diskusikan di atas, mempunyai amanah untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Ini artinya bahwa organisasi syariah tidak saja berusaha meningkatkan kesejahteraan manusia, tetapi juga kesejahteraan alam.

Konsep organisasi syariah ini jelas akan mempengaruhi bentuk akuntansi yang akan dipraktikkan. Pernyataan ini tetap konsisten dengan pandangan yang diberikan pada bab pendahuluan di atas yang memahami akuntansi sebagai *organisationally-situated practices* dan sebagai *an ever-changing entity*. Diskusi lebih rinci tentang hal ini akan disampaikan pada sub bab berikutnya.

5. Akuntansi Syariah dan PSAK 27 (Standar Akuntansi Keuangan Koperasi)

Anggapan tentang akuntansi sebagai ilmu pengetahuan dan praktik yang bebas dari nilai (*value-free*) pada akhir tahun 1970-an sudah mulai digoyang keberadaannya. Anggapan tersebut sejak lama mendominasi sebagian besar akuntan dan para peneliti di bidang akuntansi. Keadaan semacam ini semakin kuat karena adanya kecenderungan perilaku masyarakat yang terbawa oleh arus era informasi dan globalisasi. Ciri utama dari era informasi dan globalisasi ini adalah adanya kecenderungan untuk, di bidang akuntansi, melakukan harmonisasi praktik-praktik akuntansi. Ini artinya ada kehendak untuk memberlakukan

praktik-praktik akuntansi secara seragam seluruh dunia. Dengan kata lain, nilai-nilai lokal praktik akuntansi - yang mungkin sangat berbeda dengan praktik akuntansi di tiap negara dianggap menyulitkan dalam menafsirkan laporan keuangan. Singkatnya, praktik akuntansi yang beragam itu tidak *comparable*.

Mereka yang kontra dengan pandangan ini mengemukakan bahwa tindakan untuk melakukan harmonisasi merupakan tindakan *pelecehan* terhadap nilai-nilai lokal. Mereka justru melihat bahwa sebetulnya akuntansi adalah suatu bentuk pengetahuan dan praktik yang banyak ditentukan oleh lingkungannya (*non-value-free*). Atau, bahkan ada yang mengatakan bahwa akuntansi adalah "anak" yang lahir dari budaya setempat (lokal).

Pandangan kedua ini memang secara eksplisit menolak pandangan pertama yang bersifat fungsionalis dan positivistik - yang kalau kita telusuri ke belakang akar pemikirannya berasal dari August Comte. Pemikiran ini memiliki sifat reduksionis, yaitu menghilangkan kandungan nilai (*value*) yang seharusnya terkandung dalam ilmu pengetahuan dan praktik akuntansi. Keringnya nilai ini menyebabkan adanya penyimpangan perilaku (*disfunctional behaviour*) masyarakat bisnis, ketidak-seimbangan tatanan sosial, dan kerusakan lingkungan.

Akuntansi Syari'ah

Melihat hal semacam ini, usaha untuk mencari bentuk akuntansi yang berwajah humanis, emansipatoris, transendental, dan teleogikal merupakan sebuah upaya yang niscaya. Upaya ini secara filosofis dan metodologis dapat dilakukan dengan menggunakan meta-perspektif, yaitu suatu pandangan yang berusaha berada di atas perspektif-perspektif yang ada. Karena dengan cara ini pandangan-pandangan filosofis, seperti pandangan tentang hakikat manusia dan masyarakat, ontologis, epistemologi dan metodologi, menjadi lebih luas dan utuh, sehingga formulasi pengetahuan dan praktik akuntansi menjadi lebih humanis dan sarat dengan nilai. Akuntansi Syari'ah

(Triyuwono dan Gaffikin 1996)⁵ merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Yang menjadi tujuan dari Akuntansi Syariah ini adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, tran-sendental, dan teleogikal. Konsekwensi ontologis dari hal ini adalah bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas (peradaban) semu beserta jaringan-jaringan kuasanya, untuk kemudian memberikan kuasa Ilahi yang mengikat manusia dalam hidup sehari-hari (ontologi tauhid) (lihat Triyuwono 1996). Dengan cara demikian, realitas alternatif diharapkan akan dapat membakitkan kesadaran diri (*self-consciousness*) secara penuh akan kepatuhan dan ketundukan seseorang pada kuasa Ilahi. dan dengan kesadaran diri ini pula, ia akan selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam dimensi waktu dan tempat di mana ia berada. jadi, dengan Akuntansi Syariah realitas sosial yang dikonstruksi mengandung nilai tauhid dan ketundukan pada jaringan-jaringan kuasa Ilahi; yang semuanya dilakukan dengan meta-persppektif, yaitu perspektif *khalifatulLah fil ardh*, - suatu cara-pandang yang sadar akan hakikat diri manusia dan tanggung jawab kelak di kemudian hari hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam skala mikro, realitas sosial tadi dapat diidentikkan dengan realitas organisasi. Yaitu realitas yang diciptakan dalam organisasi bisnis, sehingga terbentuk suatu kondisi seperti yang diciptakan dalam ontologi tauhid tadi. Bila realitas organisasi yang demikian tercipta, maka adalah sangat mungkin bahwa realitas organisasi ini akan menebarkan rahmat tidak saja bagi mereka yang secara aktif terlibat dalam operasi organisasi, tetapi juga masyarakat luas dan lingkungan alam sekitarnya.

Cita yang cukup ideal ini bisa direalisasikan bila organisasi dikiaskan (*metaphorised*), misalnya, sebagai *zakat*, atau tepatnya realitas organisasi yang dimetaforakan dengan *zakat* (*a zakat metaphorised organisational reality*), seperti yang telah

⁵ Untuk lengkapnya baca Triyuwono, I and MJR. Gaffikin. 1996. Shari'ate accounting: an ethicalconstruction of accounting knowlege. *Critical Perspectives on Accounting Conference*. new York. April 28-28.

diterangkan di atas. Penggunaan metafora semacam ini sangat penting, karena dengan cara ini seseorang akan merancang organisasi. Banyak metafora-metafora lain, seperti *cybernetic system*, *population ecology*, *political system*, *theatre*, *culture* dan lain-lainnya, yang berdiri pada paradigma positivistik yang bisa digunakan untuk merancang organisasi (lihat Morgan 1980, 1986). Namun, tentu penggunaan masing-masing metafora tersebut mempunyai implikasi sendiri-sendiri terhadap realitas kehidupan manusia. Penggunaan metafora *amanah* dan *zakat* (*a zakat metaphorised organisational reality*) dalam bentuk yang lebih operasional merupakan salah satu alternatif untuk menciptakan realitas organisasi yang terikat pada jaringan-jaringan kuasa Ilahi.

Bila metafora ini, yaitu *a zakat metaphorised organisational reality* secara sadar diterima dan dipraktikkan dalam kegiatan bisnis sebuah perusahaan dan kegiatan bisnis secara lebih menyeluruh, maka di sini akan tercipta apa yang dinamakan dengan realitas organisasi dengan jaringan-jaringan kuasa Ilahi. *Nah*, realitas organisasi semacam ini yang harus direfleksikan secara "obyektif" oleh akuntansi. Karena dengan "obyektivitas" ini, akuntansi tidak akan membiarkan atau mendistorsikan *a zakat metaphorised organisational reality* ke bentuk realitas lainnya.

Mengapa perlu "obyektivitas"? Karena bila realitas organisasi yang telah dibangun dengan nilai-nilai Ilahi tadi direfleksikan dengan akuntansi modern yang dikonstruksi dengan nilai yang berbeda, maka realitas yang direfleksikan akan berbentuk lain. Padahal hasil refleksi tadi - bisa dalam bentuk informasi akuntansi - akan digunakan oleh manajemen atau pihak lainnya untuk mengambil keputusan. Jika keputusan yang diambil adalah keputusan yang menyimpang dari nilai-nilai Ilahi, maka keputusan tersebut akan membentuk realitas baru yang mempunyai nilai yang terdistorsi dari nilai Ilahi. Tentu hal semacam ini tidak diinginkan. Yang menjadi cita ideal adalah bagaimana realitas organisasi yang bertauhid tadi dapat direfleksikan oleh akuntansi tanpa sama sekali ada distorsi. Bila

nilai-nilai yang digunakan untuk mengkonstruksi organisasi, maka realitas organisasi akan direfleksikan tanpa ada distorsi. Keadaan semacam ini akan semakin memperkuat terciptanya realitas organisasi dengan jaringan kuasa Ilahi.

“Obyektivitas” tadi bisa dilakukan bila ada dekonstruksi teori akuntansi, terutama dari sisi pijakan epistemologinya. Dasar epistemologi terpenting adalah sikap terbuka (*open-minded*) terhadap segala bentuk pemikiran. Ini artinya dalam mendekonstruksi teori akuntansi, diperlukan adanya keterbukaan dalam menerima teori-teori lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Atau dengan ungkapan lain, epistemologi ini tidak perlu menolak secara total teori-teori akuntansi dari perspektif lainnya, melainkan harus secara rasional memanfaatkannya sebagai pelengkap bagi teori akuntansi (syariah) yang lebih komprehensif dan berwawasan tauhid (cf. Bashir 1986). Sikap terbuka ini merupakan salah satu konsep epistemologi Islam yang pada dasarnya menerima dan mengakui adanya kemajemukan, yaitu kemajemukan yang integral. Sikap ini dapat dipertegas oleh pertanyaan Dhaouadi yang mengatakan bahwa,

Islam tidak menerima dualisme, tetapi mengakui adanya pertemuan dan kesatuan dalam kemajemukan itu. Menurut pandangan Islam, memisahkan jasad dari ruh adalah tindakan melawan hakikat sesuatu, karena hal ini melanggar prinsip Islam yang sangat fundamental, yaitu tauhid (1993, 155).

Secara epistemologi, pandangan ini jelas menolak adanya dikhotomi antara dua hal yang bersifat berlawanan, tetapi sebaliknya ia menerima bahwa dua (atau lebih) yang berlawanan (atau berbeda) itu saling melengkapi. Misalnya, jasad tidak dapat meniadakan ruh, dan ruh tidak dapat meniadakan jasad. Akal tidak dapat meniadakan kalbu, dan kalbu tidak dapat meniadakan akal; keduanya adalah pasangan yang saling melengkapi. Demikian juga, obyek ilmu pengetahuan (penelitian) tidak dapat dipisahkan dari subyek ilmuwan (peneliti). Ayat-ayat *qauliyyah* dan ayat-ayat *kauniyyah* adalah ayat-ayat yang saling melengkapi. Agama dan ilmu pengetahuan (sain) juga adalah

unsur-unsur yang saling melengkapi dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri dan pemahaman terhadap agama.

Dengan epistemologi semacam ini, produk teori akuntansi yang dihasilkan akan memiliki wawasan yang lebih luas dibanding dengan teori akuntansi "tradisional." Karena, teori ini tidak hanya berdiri pada azas eti-epistemologis yang universal, yaitu keadilan Ilahi, tetapi juga memiliki sifat yang transendental dan teologikal. Ia tidak hanya memberikan perhatiannya pada kepentingan profan (bisnis) manusia, tetapi juga kepentingan ukhrawi, yang diaktualisasikan dalam kesadaran diri untuk hidup harmonis dengan jaringan-jaringan kuasa Ilahi. Barangkali inilah sosok (teori) akuntansi pada masa mendatang yang bisa dijadikan teori alternatif bagi teori-teori akuntansi lainnya yang telah ada sebelumnya.

Akuntansi Syari'ah: Quo Vadis?

Sementara ini akuntansi syari'ah (lihat Triyuwono 1995; Triyuwono dan Gaffikin 1996) masih dalam tataran filosofis. Dasar-dasar filosofis ini berguna dalam memberikan arah bagaimana akuntansi syari'ah bisa dikonstruksi. Dengan ditetapkannya dasar-dasar filosofis ini bukan berarti bahwa bangunan akuntansi syari'ah dipeoleh dengan pendekatan deduktif (*deductive approach*) saja, atau pendekatan induktif (*inductive approach*) saja, atau pendekatan etika (*ethical approach*) saja, atau pendekatan sosiologi (*sociological approach*) saja, atau ekonomi (*economic approach*) saja, secara terpisah antara yang satu dengan yang lain (lihat Belkaoui 1993, 60-5). Tetapi, secara metodologis, akuntansi syari'ah memandang pendekatan-pendekatan di atas tidak mempunyai batas-batas yang tegas (*borderless*), dan bahkan ia menggunakan agama (kitab suci) sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk mengkonstruksi bangunannya.

Dalam mencari bentuk, akuntansi syari'ah berangkat dari suatu asumsi bahwa akuntansi adalah sebuah entitas yang mempunyai dua arah kekuatan. Artinya, akuntansi tidak saja

dibentuk oleh lingkungannya, tetapi juga mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi lingkungannya, termasuk perilaku manusia yang menggunakan informasi akuntansi (Morgan 1988). Dari asumsi ini terlihat bahwa akuntansi mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi perilaku manusia (Morgan 1988, Francis 1991). Oleh karena itu, usaha yang dilakukan adalah bagaimana akuntan menciptakan sebuah "bentuk" akuntansi yang dapat mengarahkan perilaku manusia ke arah perilaku yang etis dan ke arah terbentuknya peradaban bisnis yang ideal, yaitu peradaban bisnis dengan nilai humanis, emansipatoris, transendental, dan teleogikal.

Dengan kata lain, tujuan dari akuntansi syariah adalah menciptakan informasi akuntansi yang sarat nilai (etika) dan dapat mempengaruhi perilaku para pengguna (*users*) informasi akuntansi ke arah terbentuknya peradaban ideal seperti yang dimaksud di atas. Jadi, nilai yang terkandung dalam akuntansi syariah adalah nilai yang sama dengan tujuan yang akan dicapainya, yaitu nilai humanis, emansipatoris, transendental, dan teleogikal.

Akuntansi syariah dengan nilai *humanis* berarti bahwa akuntansi yang dibentuk ini ditujukan untuk memanusiakan manusia, atau mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci. Dari beberapa penelitian diketahui bahwa praktik akuntansi telah mengakibatkan perilaku manusia menjadi *less humanis* (lihat Morgan 1988). Ini tidak berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Kuntowidjojo:

Kita tahu bahwa kita sekarang mengalami proses dehumanisasi karena masyarakat industrial kita menjadikan kita sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Kita mengalami objektivikasi ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar. Ilmu dan teknologi juga telah membantu kecenderungan reduksionistik yang melihat manusia dengan cara parsial (1991, 289).

Dengan menciptakan "bentuk"-nya yang tertentu akuntansi syariah diharapkan dapat menstimulasi perilaku manusia menjadi perilaku yang humanis. Keadaan semacam ini akan

semakin memperkuat kesadaran diri (*self-consciousness*) tentang hakikat (fitrah) manusia itu sendiri.

Kesadaran diri tentang hakikat manusia juga merupakan dasar yang memberi nilai *emansipatoris* pada akuntansi syaria'ah. Artinya, akuntansi syaria'ah tidak menghendaki segala bentuk dominasi atau penindasan satu pihak atas pihak lain. Senada dengan hal ini Kuntowidjo mengatakan:

Kita menyatu rasa dengan mereka yang miskin, mereka yang terperangkap dalam kesadaran teknokratis, dan mereka yang terganggu oleh kekuatan ekonomi raksasa. Kita ingin bersama-sama membebaskan diri dari belenggu-belenggu yang kita bangun sendiri (1991, 289).

Dengan kata lain, informasi akuntansi yang dipancarkan oleh akuntansi syaria'ah menebarkan angin pembebasan. Ia tidak lagi mementingkan satu pihak dan menyepelekan pihak lain sebagaimana terlihat pada akuntansi modern, tetapi sebaliknya ia berdiri pada posisi yang adil.

Nilai *transendental* memberikan suatu indikasi yang kuat bahwa akuntansi tidak semata-mata instrument bisnis yang bersifat profan, tetapi juga sebagai instrumen yang melintas batas dunia profan. Dengan kata lain, akuntansi syaria'ah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. Nilai ini semakin mendorong seseorang untuk selalu menggunakan, atau tunduk dan pasrah terhadap, kehendak Tuhan (yang terwujud dalam etika syaria'ah), dalam melakukan praktik akuntansi dan bisnis. Nilai transendental ini juga mengantarkan manusia untuk selalu sadar bahwa praktik akuntansi dan bisnis yang ia lakukan mempunyai satu tujuan transendental, yaitu sebagai suatu bentuk penyembahan (ibadah) kepada Tuhan Yang Maha Esa yang secara riil diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam. Nilai inilah yang dimaksud dengan *teleologikal*.

Pada tatanan yang lebih "operasional," akuntansi syaria'ah adalah instrumen yang digunakan untuk menyediakan informasi

akuntansi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) menggunakan nilai etika sebagai dasar bangunan akuntansi, (2) memberikan arah pada, atau menstimulasi timbulnya, perilaku etis, (3) bersikap adil terhadap semua pihak, (4) menyeimbangkan sifat egoistik dengan altruistik, dan (5) mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.

Dengan nilai dan ciri yang terlihat di atas, maka diharapkan akuntansi syariah akan mempunyai bentuk yang lebih sempurna bila dibanding dengan akuntansi modern.

Akuntansi Syariah: Mencari Bentuk

Pada tatanan yang lebih teknis, yaitu dalam bentuk laporan keuangan, akuntansi syariah masih dalam tahap mencari dirinya sendiri. Dalam tulisan ini bentuk konkrit akuntansi syariah belum dapat ditampilkan, karena untuk sampai pada praktik dan bentuk laporan keuangan memerlukan dukungan teori yang kuat. Lagi pula, usaha ini bukan suatu sebaliknya, ini merupakan suatu langkah yang sangat mendasar, karena ia berusaha berangkat dari landasan filosofis untuk melakukan sebuah perusahaan. Pemikiran pada tingkat filosofis tidak akan banyak memberikan perubahan bila tidak dilanjutkan pada pemikiran teoritis dan teknis. Oleh karena itu pemikiran ke arah dua hal yang terakhir ini adalah suatu langkah yang sangat dibutuhkan.

Hanya ada beberapa penulis (misalnya, Gambling dan Karim 1991; Baydoun dan Willet 1994) - untuk tidak mengatakan sedikit - yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan akuntansi dengan menggunakan nilai Islam. Pemikiran mereka jelas memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan akuntansi yang bernuansa Islami. Gambling dan Karim (1991, 87-104), misalnya, memberikan penilaian terhadap pendekatan-pendekatan dalam membangun akuntansi modern, seperti *empirical-inductive approach* dan *empirical-deductive approach*. Disamping itu mereka juga memberikan

suatu penilaian terhadap metode dan pengukuran akuntansi, serta klasifikasi aktiva.

Mereka berdua menyatakan bahwa untuk kepentingan zakat, pengukuran yang menggunakan *historical cost accounting* sama sekali sudah tidak relevan untuk digunakan. mereka berargumentasi bahwa yang lebih tepat adalah menggunakan *current cost accounting*, atau, *net realizable value*, atau *continuously contemporary accounting* (CoCoA)-nya Chambers (1996). Konsekwensi dari hal ini adalah bahwa penilaian persediaan (*inventory*) dengan metode *cost or market whichever is lower* (comwil) menjadi tidak relevan lagi. Kemudian Gambling dan Karim (1991, 93) juga menyatakan bahwa pengklasifikasian aktiva menjadi aktiva lancar (*current assets*) dan aktiva tidak lancar (*non-current assets*) mempunyai arti yang berbeda dengan pandangan syari'ah. Karena menurut syari'ah, maksud utama dari pengklasifikasian tersebut adalah untuk mengidentifikasi aktiva yang terkena zakat (*zakatable asset*). Zakat, menurut mereka, dikenakan terhadap aktiva yang diperoleh untuk diperdagangkan, yaitu modal kerja bersih (*net working capital*) termasuk kas, dan bukan pada aktiva yang dibeli untuk digunakan dalam operasi, yaitu aktiva tetap (*fixed assets*).

Perhatian Gambling dan Karim (1991) terhadap zakat - yang menyebabkan adanya perubahan metode penilaian dan makna pengklasifikasian aktiva - sangat menarik untuk dicermati. Apa yang mereka katakan selaras dengan apa yang didiskusikan di sini. Pada diskusi di atas kita melihat bahwa organisasi syari'ah mempunyai metafora operasional *a zakat metaphorised organisational reality*, di mana akuntansi harus merefleksikannya dalam bentuk informasi akuntansi. Konsekwensi dari hal ini adalah bahwa bukan suatu hal yang aneh bila akhirnya nanti *the bottom line* dari laporan rugi-laba (*income statement*) tidak lagi laba bersih (*net profits*), tetapi "zakat" atau sesuatu yang lain. Tetapi proses menuju arah ini bukan suatu proses yang sederhana, karena melibatkan pemikiran ke arah rekonstruksi teori akuntansi.

Sehubungan dengan pengukuran yang digunakan dalam akuntansi, Baydoun dan Willet (1994) juga berpendapat bahwa *current values (cost) accounting* adalah alat ukur yang lebih tepat digunakan dalam pandangan syariah. Mereka berpendapat bahwa laporan keuangan dilaporkan dengan menggunakan kalkulasi nilai pasar yang berdasarkan pada biaya aktivitas yang berada di luar *database* perusahaan. Bagi mereka, nilai pasar sekarang (*current market value*) sebuah aktiva tidak selalu berasal dari transaksi biaya historik tunggal dari perusahaan yang memiliki aktiva, tetapi ia berdasarkan pada rata-rata nilai dari suatu set transaksi yang terjadi jika perusahaan membeli atau menjual aktiva itu sekarang. Mereka juga menekankan bahwa penggunaan metode *current value accounting* yang sebetulnya merupakan perluasan akuntabilitas perusahaan ke *domain* sosial. Ini dipertegas dengan pernyataan mereka yang mengatakan bahwa nilai yang ditambahkan perusahaan pada perekonomian dilakukan melalui (interaksi) tenaga kerja (pada masa lalu dan sekarang) dan nilai ini harus didistribusikan secara adil sesuai dengan yang ditetapkan dalam syariah.

Atas dasar ini kemudian mereka mendesain *Value Added Statement*, disamping *Cash Flow Statement* dan *Current Value Balance Sheet*, sebagai unsur laporan keuangan. *Value Added Statement*, pada dasarnya adalah semacam Laporan Rugi-Laba (dalam pengertian akuntansi konvensional). Berbeda dengan Laporan Rugi-Laba *Value Added Statement*, lebih menekankan pada distribusi nilai tambah yang diciptakannya kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti: *beneficiaries* (dalam bentuk zakat, infak, dan sadaqah), pemerintah (pajak), pegawai (gaji), pemilik (dividen), dan dana yang ditanamkan kembali. *Value Added Statement* ini memberikan informasi yang sangat jelas tentang kepada siapa dan berapa besar nilai tambah yang diciptakan oleh perusahaan akan didistribusikan.

Pemikiran yang disampaikan oleh Gambling dan Karim (1991) dan Baydoun dan Willet (1994) jelas memberikan nuansa baru pengembangan akuntansi. Pemikiran dan kontribusi mereka dapat digunakan sebagai "bahan baku" dalam mengkonstruksi

akuntansi syariah. Dianggap bahan baku karena kontribusi mereka masih bersifat parsial. Dengan kata lain, perhatian mereka masih terbatas pada distribusi kesejahteraan kepada *stakeholders*, belum memperhatikan aspek kesejahteraan untuk alam lingkungan. Pada sisi yang lain, mereka juga belum membicarakan konsep teoritis akuntansi syariah yang sebetulnya merupakan aspek yang sangat fundamental dalam membangun praktik akuntansi yang berdasarkan nilai syariah.

Beberapa Aspek Penting PSAK27

Akuntansi, seperti telah dijelaskan di muka, selain dipengaruhi oleh faktor kultur, ekonomi, politik, dan sosial, juga dipengaruhi oleh persepsi dan bentuk organisasi. "Hukum" ini, ternyata, juga berimbas pada akuntansi koperasi.

Bentuk koperasi yang lebih berwatak "sosial" memberikan warna yang sama pada praktik, atau standar akuntansi keuangan, koperasi. Namun, meskipun ia (akuntansi) berada dalam wadah koperasi yang berwatak sosial, ia masih banyak diwarnai oleh watak aslinya yang kapitalistik. Hal ini cukup logis, karena akuntansi koperasi mengadaptasi -untuk tidak mengatakan mengadaptasi - prinsip akuntansi modern yang umum dipraktikkan ke dalam konteks koperasi.

Konsep *income* yang dianut oleh koperasi, misalnya, sangat dekat dengan konsep *net income to stockholders*. Konsep ini sebetulnya diturunkan dari *proprietary approach*, namun dalam praktik banyak akuntan yang mengaplikasikannya ke dalam *entity approach* yang mengakui laba akuntansi (*accounting profits*) dari sebuah entitas sebagai bagian yang diperuntukkan semata-mata kepada pemilik.⁶ Struktur dan bentuk laporan keuangan, yaitu Laporan Rugi-Laba (*Income Statement*), akan tampak dalam bentuk yang sama dengan apa yang kita kenal selama ini. Bagian yang diperuntukkan kepada "pemilik" menggunakan istilah Sisa

⁶ Lihat AICPA *Professional Standards*, p. 8795, sec. 4091 13 dikutip dari Hendriksen (1982, 165).

Hasil Usaha (SHU) yang esensinya tidak lebih dari Laba Bersih (*net income*) (lihat PSAK 27).

Bentuk yang demikian sebetulnya cukup “wajar” kalau kita lihat koperasi sebagai sebuah organisasi yang mempunyai tujuan, seperti dinyatakan dalam UU. No. 25/1992 tentang Perkoperasian, untuk “memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.”⁷ Di dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa tujuan khusus koperasi adalah memajukan kesejahteraan para anggotanya. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang logis bila laba bersih, dalam hal ini Sisa Hasil Usaha, diperuntukkan kepada anggota.

Jika aspek kedua, yaitu “memajukan kesejahteraan masyarakat⁸ pada umumnya” diaktualisasikan dalam bentuk nyata, maka *value added concept of income* yang pernah diajukan oleh Baydoun dan Willet (1994) (lihat juga Hendriksen 1982) akan lebih tepat untuk diimplementasikan. Karena konsep ini mempunyai kepedulian yang lebih luas daripada konsep lainnya dalam distribusi *income*. *Value added income*, dalam hal ini, adalah harga pasar dari produk (atau jasa) yang dijual perusahaan dikurangi dengan harga produk (atau jasa) yang diperoleh perusahaan. Bagi Hendriksen *value added income* adalah:

...is the total pie that can be divided among the various contributors of factors inputs to the enterprise in the production of goods and services (1982, 163).

Jadi *value added income* merupakan kue yang sedemikian rupa harus didistribusikan kepada “masyarakat.” Pengertian masyarakat dan distribusi *income* di sini jelas mempunyai makna yang berbeda dengan konsep/aspek yang pertama tadi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota.

Jika koperasi lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan para anggotanya, maka dengan sendirinya anggota

⁷ Undang-undang No. 25/1992 tentang perkoperasian Bab II, pasal 3.

⁸ Masyarakat dalam hal ini bisa diartikan semua karyawan, pemilik, kreditor, dan pemeintah (Hendriksen 1982, 165). Atau, dalam arti *stakeholders* yang meliputi semua karyawan, pemilik, kreditor, pemerintah, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan koperasi (perusahaan).

menjadi prioritas utama. Dan ini, dalam kenyataannya, dicerminkan dalam perangkat akuntansi yang dianut oleh koperasi, yaitu, PSAK 27. Namun sebaliknya, bila yang ditekankan adalah "masyarakat," apalagi yang dimaksud masyarakat di sini adalah *stakeholders*, maka dengan sendirinya para anggota, atau para "pemilik," akan mendapat pembagian "kue." Konsekwensinya adalah bahwa pengukuran besarnya kue menggunakan *value added concept of income*. Konsep ini memberikan informasi yang lebih jelas dan rinci tentang pendistribusian *income*.

Dalam wacana teori akuntansi, selain *value added concept of income*, ada beberapa konsep *income* yang lain, seperti *enterprise net income*, *net income to investors*, *net income to stockholders*, dan *net income to residuequity holders* (lihat Hendriksen 1982).

Pengertian *income* dalam konsep *enterprise net income* adalah kelebihan pendapatan (*revenues*) atas beban (*expenses*) dan juga laba (*gains*) dan rugi (*losses*). *Income* dalam pengertian ini diperuntukkan kepada pemilik (*stockholders*), *bondholders*, dan pemerintah. Unsur-unsur seperti beban bunga yang didistribusikan kepada *bondholders* dan deviden yang didistribusikan kepada pemilik adalah bersifat *financial*, dan laba bersih bersifat *operating*. Sedangkan pajak penghasilan bukan bersifat *financial* ataupun *operating*.

Income dalam konsep *net income to investors* adalah kelebihan pendapatan atas beban ditambah laba dikurangi rugi dan pajak penghasilan. *Income* ini didistribusikan kepada pemilik dan kreditor jangka panjang. Sedangkan *income* menurut konsep *net income to stockholders* adalah sama dengan *net income to investors* dikurangi dengan beban bunga dan laba yang didistribusikan. *Income* ini dibagikan kepada pemilik. Konsep yang terakhir adalah *net income residual equity holders*. menurut konsep ini, *income* adalah sebesar *net income to stockholders* dikurangi dengan dividen saham istimewa di mana *income* ini didistribusikan kepada pemegang saham biasa.

Dari beberapa konsep tersebut di atas, Baydoun dan Willet (1994) beranggapan bahwa konsep yang pertama, yaitu *value*

added concept of income adalah yang paling dekat dengan syari'ah. Sedangkan koperasi yang lebih berwatak sosial, seperti yang telah diuraikan di atas, belum menggunakan konsep ini. Tetapi sebaliknya menggunakan konsep yang lebih dekat dengan *net income to stockholders*.

Aspek yang lain adalah bahwa PSAK 27, sebagaimana halnya standar akuntansi keuangan lainnya, sebenarnya menyajikan informasi akuntansi yang sudah "basi." Karena konsep dasar yang digunakan akuntansi adalah *historical cost accounting* yang sebetulnya adalah derivasi dari konsep konservatif (sterling 1967, 111).

Konsep *historical cost accounting*, misalnya dengan dalih menjaga objektivitas dan variabilitas, begitu kuat dipertahankan sehingga ia seolah-olah menjadi mitos. Padahal banyak akuntan sebetulnya menyadari bahwa salah satu kelemahan dari akuntansi modern (atau laporan keuangan) adalah terletak pada konsep ini. Dari diskusi di atas kita sudah mengetahui Gambling dan Karim (1991) berpendapat bahwa konsep ini tidak tepat bila digunakan untuk menentukan besarnya zakat..

Aspek yang terakhir adalah bahwa PSAK 27 belum memberikan kepeduliannya terhadap lingkungan. Kenyataan ini sebetulnya tidak saja ditemui pada PSAK 27 tetapi juga pada akuntansi modern yang dipraktikkan saat ini. Para pengusaha dan akuntan belum menyadari bahwa masalah lingkungan sebetulnya juga merupakan masalah bisnis (Houldin 1993, 3). Akuntan, menurut Houldin (1993, 4) belum melibatkan dirinya dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan. Padahal akuntan sebetulnya dapat memberikan kontribusi yang besar dalam manajemen lingkungan, seperti dalam:

- (1) Modify existing accounting system..., (2) Eliminate conflicting elements of the accounting system..., (3) Plan for financial implications of the environmental agenda..., (4) Introduce environmental performance to external reporting..., (5) Develop new accounting and informaton system (as in ecobalance-sheets) (Houldin 1993, 4).

Kepedulian akuntan terhadap lingkungan juga akan memberikan suatu pengertian bahwa selayaknya perusahaan, sebagaimana dinyatakan dalam *Environmental Protection Act* 1990 dan *Water Act* 1990 di Inggris, melakukan (1) investasi dalam proteksi polusi, (2) investasi dalam teknologi pemurni limbah, (3) perubahan produk dan proses produksi, (4) *review* terhadap nilai aktiva, dan (5) pembelanjaan pada pengolahan dan pembuangan limbah (lihat Houldin 1993, 5).

Kepedulian akuntan juga akan mempercepat terwujudnya akuntansi lingkungan yang mencakup:

(1) accounting for contingent liabilities/risks, (2) accounting for asset revaluations and capital projections, (3) costs analysis in key areas such as energy, waste and environmental protection, (4) investment appraisal to include environmental factors, (5) development of new accounting and information system, (6) assessing the cost and benefits of environmental improvement programmes, and (7) developing accounting techniques which express assets and liabilities and cost in ecological (non-financial) term (Houldin 1993, 6).

Dengan memasukkan unsur lingkungan ini cakupan akuntansi menjadi lebih luas. Namun yang perlu diperhatikan dalam pengembangan akuntansi ini adalah adanya kebutuhan pemikiran dalam tingkat teori yang bersifat *integral*. Inilah sebetulnya yang menjadi bidang garap teori akuntansi syariah.

6. Penutup

Sebetulnya apa yang kita diskusikan di atas adalah upaya kita mencari teori organisasi dan akuntansi syariah. Konsep organisasi dan akuntansi syariah yang kita diskusikan merupakan hasil dekonstruksi terhadap konsep organisasi dan akuntansi modern - yang diklaim sebagai produk pemikiran rasional manusia yang biasanya menekankan pada aspek empiris, fungsional, dan praktis. Dikatakan demikian karena, secara epistemologis, organisasi dan akuntansi syariah menghadirkan

unsur lain, yaitu agama (al-Qur'an) sebagai salah satu pijakan untuk mengkonstruksinya. Dengan kata lain, konstruksi organisasi dan akuntansi syariah berdiri di atas dua fondasi, yaitu *ayat-ayat kauniyyah* (dunia empiris) dan *ayat-ayat qauliyyah* (al-Qur'an).

Upaya memformulasikan konsep organisasi dan akuntansi syariah sebetulnya adalah pencarian *summatulLah* dalam dunia bisnis. Kosep tersebut tidak lebih dari hukum-hukum yang memberi arah (etis) dalam melakukan praktik bisnis. Namun demikian, bagaimanapun sempurnanya konsep organisasi dan akuntansi syariah yang dikonstruksi di atas dua fondasi tersebut di atas, ternyata masih belum cukup bila konsep tersebut tidak diimbangi oleh sesuatu "yang lain." Karena kosep tersebut pada dasarnya adalah sesuatu yang bersifat eksoteris. Tanpa didampingi unsur yang lain yang bersifat esoteris, maka, secara ontologis, konsep tersebut tidak akan mampu menciptakan peradaban (bisnis) yang humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal. Sesuatu yang bersifat esoteris tersebut adalah "hati nurani" yang selalu cenderung kepada kebenarani.

Daftar Pustaka

- Abbel-Magid, Moustafa F. 1981. The theory of Islamic banking: accounting implications. *The International Journal of Accounting Education and Research* 17 (1): 79-102.
- Alkafaji, Yass Abbass. 1983. *An Empirical Investigation into the association between Major Politico-socioeconomic Factors and Accounting Practices in a Sample of World Countries*. Ann Arbor: University Microfilms International.
- Arrington, C. Edeard and Jere R. Francis. 1993. Giving economic accounts: accounting as cultural practice. *Accounting, Organizations and Society* 18 (2/3): 107-24
- Bailey, Derek T. 1988. *Accounting in Socialist Countries*. London: Routledge.
- Bailey, Derek T. 1990. Accounting in the shadow of stalinism. *Accounting, Organizations and Society* 15 (6): 513-25
- Bashir, Zakaria. 1986. Towards an Islamic theory of knowledge, part one. *Arabia*. April: 74-5

- Baydoun, N and Rofer Willet. 1994. Islamic accounting theory. *The AANZ Annual Conference*.
- Booth, Peter. 1993. Accounting in churches. a research framework and agenda. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 6 (4): 37-67.
- Boyce, L. Fréd. 1984. Accounting for churches. *Journal of Accountancy* February: 96-102.
- Burchell, Stuart, Colin Clubb and Anthony G. Hopwood. 1985. Accounting in its social context: towards a history of value added in the United Kingdom. *Accounting, Organizations and Society* 10 (4): 381-413.
- Burkel, D. and B. Swindle. 1988. Church accounting: Is there only one way?. *The Woman CPA* July: 27-31.
- Burrell, Gibson and Gareth Morgan. 1979. *Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life*. London: Heinemann.
- Chryssides, George D. and John H. Kaler. 1993. *An Introduction to Business Ethics*. London: Chapman & Hall.
- Chua, Wai Fong. 1986. Radical developments in accounting thought. *The Accounting Review* LXI (4): 601-32
- Cronhelm, F. W. 1978. *Double Entry by Single*.
- Cunningham, G. and D. Reemsnyder. 1983. Church accounting: The other side of stewardship. *Management Accounting* August: 58-62.
- Dhaouadi, Mahmoud. 1993. Reflections into the spirit of the Islamic corpus of knowledge and the rise of the new science. *The American Journal of Islamic Social Sciences* 10 (2): 153-64.
- Dillard, Jesse F. 1991. Accounting as a critical social science. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 4 (1): 8-28.
- Evan, William M. and R. Edward Freeman. 1993. A stakeholder theory of the modern corporation: Kantian capitalism. in Chryssides, George D. and John H. Kaler. 1993. *An introduction to Business Ethics*. London: Chapman & Hall: 254-66.
- Francis, Jere R. 1990. After virtue? accounting as a moral and discursive practice. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 3 (3): 5-17.
- Friedman, Milton. 1970. The social responsibility of business is to increase its profits. *The New York Times Magazine*. September 13.
- Gambiling, Trevor and Rifaat Ahmed Abdel karim. 1991. *Business and Accounting Ethics in Islam*. London: Mansell.
- Gray, S.J. 1988. Towards a theory of cultural influence on the development of accounting systems internationally. *Abacus* 24 (1): 1-15.
- Haqiqi, Abdul Wassay and Felix Pomeranz. 1987. Accounting Needs of Islamic banking. *Advances in International Accounting* 1: 153-168. .
- Hatfield, Henry R. 1976. *Modern Accounting*. New York: Arno Press.
- Hines, Ruth D. 1988. Financial accounting: in communicating reality; we construct reality. *Accounting, Organizations and Society* 13 (3): 251-261.

- Hines, Ruth D. 1989a. Financial accounting knowledge, conceptual framework projects and the social construction of the accounting profession. *Accounting, Organizations and Society* 2 (2): 72-92.
- Hines, Ruth D. 1989b. The sociopolitical paradigm in financial accounting research. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* 2 (1): 52-76.
- Hofstede. G. 1980. *Culture's Consequences: International Differences in Work Related Values*. London: Sage Publications.
- Hopwood, Anthony G. 1978. Towards an organizational perspective for the study of accounting and information system. *Accounting, Organization and Society* 3 (1): 3-13.
- Hopwood, Anthony G. 1983. On trying to study accounting in the contexts in which it operates. *Accounting, Organizations and Society* 8 (2/3): 287-305.
- Hopwood, Anthony G. 1987. The archaeology of accounting systems. *Accounting, Organizations and Society* 12 (3): 207-34.
- Hopwood, Anthony G. 1990. Accounting and organisation change. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 3 (1): 7-17.
- Hornigren, Charles T. and George Foster. 1991. *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. Englewood-Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Houldin, martin. 1993. An introduction to the issues - an overview. in Gray, Rob, Jan Bebbington, and Diane Walters. *Accounting for the Environment*. London: Chartered Association of Certified Accountants.
- Kerf, A Sonny. *Etika Bisnis: membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- King, A. 1988. Automating church accounting. *Management Accounting (US)* March: 18-20.
- Kuntowijoyo, K. 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: penerbit Mizan.
- Laughlin, R. 1988. Accounting in its social context: a analysis of the accounting system of the Church of England. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. 1(2): 19-42.
- Laughlin, R. 1990. A Model of Financial accountability and the Church of England. *Financial Accountability and management* 6 (2): 93-114.
- Lewis, B. 1950. *The Arabs in History*. London: Hutchinson.
- Lieber, Alfred E. 1968. Eastern business practices and medieval European commerce. *The Economic History Review*. xxi (2): 230-43.
- Littleton, A. C. dan B. S. Yamey. 1978. *Studies in the History of Accounting*. new York: Arno Press.
- Luzzatto, G. 1961. *An Economic History of Italy, from the Fall of the Roman Empire to the Beginning of the 16th Century*. London: Routledge-Kegan Paul.
- Madjid, Nurcholish. 1955. *Islam Agama kemanusiaan: membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: yayasan Wakaf Paramadina.

- Manicas, Pêter. 1993. Accounting as a human science. *Accounting, Organizations and Society* 18 (2/3): 147-161.
- Miller, Peter and Christopher Napier. 1993. Genealogies of calculation. *Accounting, Organizations and Society* 18 (7/8): 631-47.
- Morgan, Gareth. 1986. *Images of Organization*. beverley Hills: Sage.
- Morgan, Gareth. 1988. Accounting as reality construction: towards a new epistemology for accounting practice. *Accounting, Organizations and Society* 13 (5): 477-85.
- Morgan, Gareth and Linda Smircich. 1980. The case for qualitative research. *Academy of Management* 5 (4): 491-500.
- Perera, M. H. B. 1989. Towards a framework to analyze the impact to culture on accounting. *The International Journal of Accounting* 24 (1): 42-56.
- Rahardjo, Dawam. 1955. Khalifah. *Ulumul Qur'an* VI (1): 40-7.
- Riahi-Belkaoui, Ahmed and Ronald D Picur. 1991. Culture determinism and the perception of accounting concepts. *The International Journal of Accounting* 26 (2): 118-30.
- Rosenau, Pauline Marie. 1992. *Post-modernism and the Social Sciences: Insights, Inroads, and Intrusions*. Princeton, NJ: Princeton University Press.